



POKOK PIKIRAN DAN REKOMENDASI TENTANG KURIKULUM MATA PELAJARAN BAHASA INGGRIS TAHUN 2013

ASOSIASI GURU BAHASA INGGRIS DI INDONESIA
THE ASSOCIATION OF TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE IN INDONESIA
(TEFLIN) Alamat: Jl. Jaya Perkasa No. 1, Kampus UPI, Bandung 40154

POKOK PIKIRAN DAN REKOMENDASI TENTANG KURIKULUM MATA PELAJARAN BAHASA INGGRIS TAHUN 2013

RINGKASAN EKSEKUTIF

TEFLIN (*the Association of Teaching English as a Foreign Language in Indonesia*), sebagai organisasi profesi guru bahasa Inggris, turut menyambut kehadiran gagasan besar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu **Kurikulum 2013**. TEFLIN berpandangan bahwa upaya pengembangan kurikulum pada tataran nasional memerlukan kajian komprehensif yang menyangkut landasan filosofis dan yuridis, serta teori bahasa dan pembelajaran bahasa dalam kaitan dengan kurikulum bahasa Inggris, dan pertimbangan berkaitan dengan kesiapan pelaku (pengawas, kepala sekolah, guru dan siswa) dan pendukung implementasi lainnya (silabus, buku dan fasilitas pembelajaran).

Kompetensi Inti (KI) dan **Kompetensi Dasar** (KD) amat fundamental dan strategis karena menyangkut pengembangan bahan, penyiapan guru, pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar, serta evaluasi secara keseluruhan. Untuk itu, KI dan KD perlu dibahasakan sehingga mudah dipahami, dan dilengkapi dengan indikator-indikator pencapaiannya. KD yang mencirikan kekhasan Mata Pelajaran Bahasa Inggris perlu diperhatikan agar prinsip-prinsip pembelajaran Bahasa Inggris untuk komunikasi dan alat mencari ilmu tidak dikorbankan.

Waktu yang relatif singkat menjelang implementasi kurikulum tersebut berpotensi munculnya kelemahan di sana-sini baik dari sisi keabsahan dokumen, sosialisasi, maupun kemungkinan kesulitan implementasinya di lapangan. TEFLIN merekomendasikan kepada lembaga terkait untuk segera melakukan perbaikan dalam redaksi, gradasi, dan koherensi Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar pelajaran Bahasa Inggris sehingga keterbacaannya meningkat. Selain itu, perlu segera diperjelas serta disosialisasikan posisi buku babon, silabus, fokus keterampilan berbahasa yang dikembangkan, ujian nasional, kurikulum SMK, serta status bahasa Inggris di SD. Pemerintah juga disarankan untuk melakukan proses sosialisasi yang lebih konseptual mengenai apa yang harus dilakukan oleh guru di lapangan dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk LPTK dan organisasi profesi terkait.

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN.....	1
II. LANDASAN PENGEMBANGAN	1
Hakikat Bahasa	3
Hakikat Belajar Bahasa	3
Filsafat Pendidikan, Aspek Yuridis, Sosok Peserta Didik dan Kebutuhannya	4
III. REKOMENDASI	6
KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR.....	6
FOKUS KURIKULUM BAHASA INGGRIS 2013	9
KEDUDUKAN BAHASA INGGRIS DI SD	9
STATUS BUKU “BABON”	10
STATUS SILABUS	10
POSISI UJIAN NASIONAL.....	11
IMPLEMENTASI KURIKULUM.....	11
PERHATIAN TERHADAP KURIKULUM SMK	12
KETERLIBATAN LPTK	12
ASPEK YURIDIS.....	13
IV. PENUTUP	14

I. PENDAHULUAN

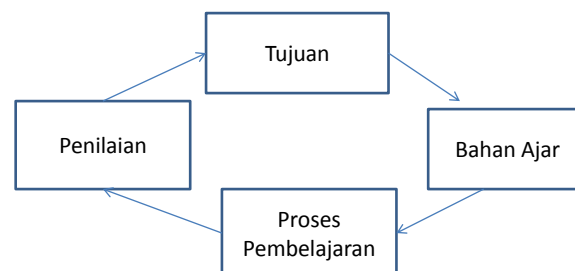
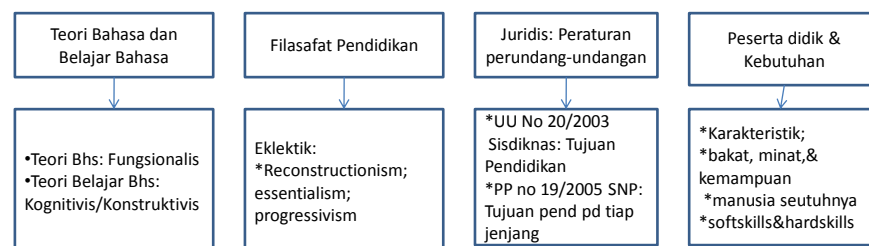
Seperti kita ketahui, dalam waktu dekat pemerintah akan memberlakukan Kurikulum 2013, yang bagi sebagian besar pemerhati dan praktisi pendidikan masih menyisakan banyak persoalan, baik dari sisi substansi, koherensi maupun implementasinya nanti di lapangan. Sebagai organisasi profesi nirlaba yang bergerak dalam mempromosikan pendidikan, bahasa, budaya dan sastra Inggris, serta dalam memberikan kontribusi bagi pengembangan arah dan kebijakan pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia, TEFLIN memandang perlu untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran dan gagasan para anggotanya mengenai rencana implementasi Kurikulum Bahasa Inggris 2013 yang saat ini sedang gencar disosialisasikan pemerintah. Pokok-pokok pikiran itu disarikan dari *Focus Group Discussion* (FGD) TEFLIN yang dilaksanakan pada tanggal 16-17 Februari 2013 di Hotel Enhaii, Bandung, khusus untuk menyikapi Kurikulum 2013. (Daftar Peserta FGD terlampir).

Pokok pikiran ini mencakup masukan tentang landasan pengembangan Kurikulum Bahasa Inggris 2013 dengan analisis terkait hakikat bahasa dan pembelajaran bahasa, serta rekomendasi TEFLIN atas rencana implementasi Kurikulum 2013.

II. LANDASAN PENGEMBANGAN

Dalam pengembangan kurikulum bahasa secara sistematis, hubungan antara landasan kurikulum dengan pengembangan komponen kurikulum dapat digambarkan sebagai berikut.

Landasan Kurikulum Bahasa Inggris



Dalam hal pengembangan kurikulum bahasa, termasuk kurikulum bahasa Inggris yang memiliki landasan pengembangannya tersendiri, landasan yang digunakannya sekurang-kurangnya harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut.

1. Filsafat pendidikan yang menjadi landasan pengembangan kurikulum yang sejalan dengan tujuan pendidikan nasional menggambarkan cara pandang kita tentang apa yang harus dicapai oleh peserta didik melalui pendidikan dalam setiap jenjang pendidikan. Oleh karena itu, pemilihan pandangan filsafat pendidikan tentu harus sejalan dengan tujuan pendidikan nasional tersebut.
2. Prinsip, teori atau keyakinan tentang hakikat bahasa yang diturunkan dari berbagai teori kebahasaan yang dipandang paling sejalan dengan tujuan pengajaran Bahasa.
3. Prinsip, teori atau keyakinan tentang bagaimana bahasa dipelajari oleh peserta didik yang diturunkan dari berbagai teori belajar yang dipandang sejalan dengan tujuan pembelajaran bahasa tersebut.
4. Aspek yuridis, mengingat kurikulum adalah bagian dari kebijakan publik. Untuk itu, dalam pengembangan kurikulum harus diperhatikan aspek-aspek yuridis (peraturan perundang-undangan) yang berkaitan dengan pendidikan, antara lain UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas (Bab II Pasal 2 tentang dasar pendidikan nasional dan Pasal 3 tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional; Bab IX tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP); Bab X tentang Kurikulum; Bab XI tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan); Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang SNP terkait dengan 8 standar nasional pendidikan; serta Permendiknas terkait dengan 8 SNP sebagai pedoman yang lebih operasional dalam pengembangan dan penerapan kurikulum.
5. Karakteristik peserta didik dan kebutuhannya dalam belajar bahasa Inggris berdasarkan pemahaman yang komprehensif baik dari sisi status bahasa Inggris dalam konteks lingkungan Indonesia, maupun dalam ketersediaan tenaga guru profesional dikaitkan dengan tuntutan penyiapan generasi emas tahun 2045 yang kompetitif secara global.

Berdasarkan kelima landasan tersebut, beberapa pemikiran berikut harus menjadi pertimbangan dalam mengembangkan kurikulum bahasa Inggris 2013 khususnya dalam menyempurnakan salah satu dokumen kurikulum, antara lain:

- Landasan dan Garis Besar Pengembangan Kurikulum Bahasa Inggris.
- Standar Isi yang merinci kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dan bahan ajar yang pemilihan dan pengembangannya didasarkan atas landasan yang digunakan dalam pengembangan kurikulum tersebut.
- Standar Proses yang merinci bentuk perencanaan pembelajaran dan strategi implementasi pembelajaran yang dikembangkan guna membantu peserta didik dan guru dalam mencapai apa yang dimandatkan dalam standar isi (komptensi dan bahan ajar), dan
- Standar Penilaian yang memandu guru dalam memilih dan mengembangkan alat penilaian yang dapat memastikan bahwa peserta didik mencapai kompetensi berikut indikator pencapaiannya yang dirumuskan dalam silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran.

Berdasarkan beberapa pemikiran yang disintesis dari beberapa sumber terkait dengan landasan pengembangan kurikulum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa komponen kurikulum bahasa Inggris, sekurang-kurangnya memuat rumusan mengenai:

HAKIKAT BAHASA

1. Fungsionalis: Bahasa adalah alat komunikasi di antara guru, peserta didik, dan masyarakat yang beragam tergantung pada siapa yang berkomunikasi, pada situasi seperti apa komunikasi akan terjadi, dan apa yang dikomunikasikan. Tujuan komunikasi dalam pandangan ini adalah membangun hubungan sosial (*interpersonal*) dan mengembangkan wawasan melalui pertukaran informasi di antara pihak yang terlibat dalam komunikasi (*transaksional*) yang disampaikan melalui baik media lisan maupun tulisan.
2. Kemampuan mengomunikasikan apa yang dirasakan, diketahui, dan dilihat/diamati di antara pihak yang terlibat dalam komunikasi harus didasarkan pada nilai-nilai sosial-kultural *interlocutor* (yang terlibat dalam komunikasi) agar apa yang dikomunikasikannya berterima.
3. Kegiatan berkomunikasi yang sifatnya dialogis yang dilandasi nilai-nilai tersebut diharapkan dapat membentuk pribadi peserta didik yang santun, toleran, saling menghargai, dan bekerjasama, percaya diri, kreatif, dan kritis serta tekun melalui bentuk dan kegiatan komunikasi baik melalui medium lisan maupun tulisan. Ini diwujudkan melalui perpaduan tujuan dalam berkomunikasi, yakni interpersonal, transaksional, dan presentasional.
4. Dalam pandangan fungsionalis (sistemik-fungsionalis) kegiatan komunikasi tertata melalui keterpaduan antara aturan kebahasaan (pemilihan, kata, frase, kalimat/ujaran yang terangkai secara kohesif dan koheren) dengan aturan sosial-kultural penggunaan bahasa yang diwujudkan dalam berbagai jenis wacana lisan dan tulis yang dibutuhkan pengguna bahasa untuk berbagai tujuan dan kebutuhan komunikasinya dalam situasi dan lingkup komunikasi tertentu (keseharian, pendidikan, pekerjaan, dan akademis). Aturan sosial-kultural dalam penggunaan bahasa antara lain mencakup etika dalam berkomunikasi yang diwarnai oleh nilai-nilai silang budaya.

HAKIKAT BELAJAR BAHASA

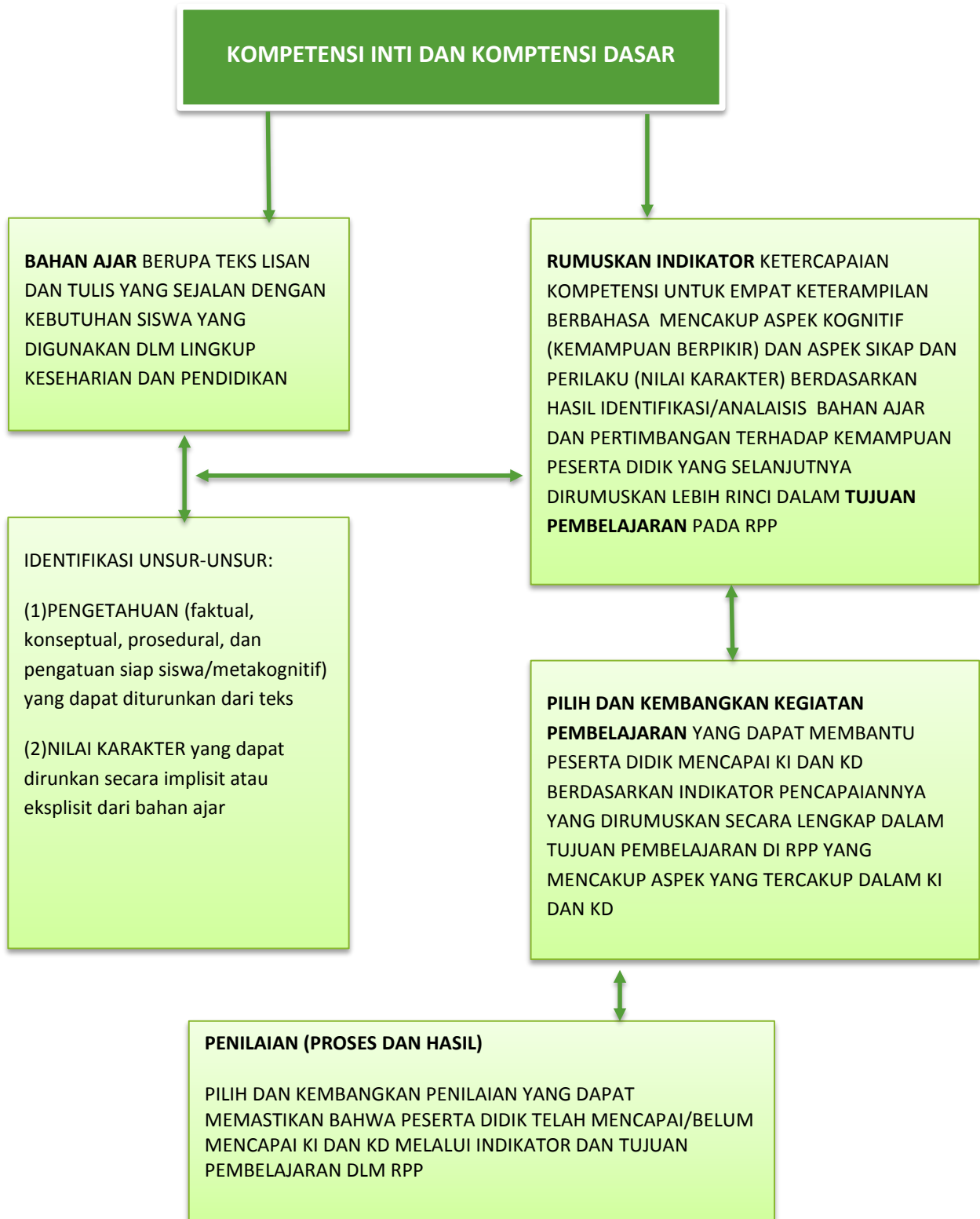
1. Pandangan kognitivistik: Belajar bahasa akan bermakna bagi peserta didik bila yang mereka pelajari berkaitan dengan pengetahuan siapnya (*prior knowledge*) dan pengalamannya.
2. Dalam pandangan lainnya, belajar bahasa harus berlangsung dengan melibatkan kemampuan berpikirnya secara berjenjang, mulai dari mengetahui, memahami, menggunakan, menganalisis, melakukan sintesa, dan mengevaluasi apa yang dipelajarinya. Dalam pandangan ini, belajar bahasa harus dapat membantu peserta didik untuk menerima, menanggapi apa yang dipelajarinya, meresapkan (mengorganisasikan), menghayatinya, dan memunculkan apa yang dipelajarinya dalam perilakunya (aspek afektif). Dalam pandangan ini pula mempelajari bahasa hendaknya melibatkan aspek keterampilan motorik/fisk, mulai dari proses menerima, berkonsentrasi, meniru, mempraktekkan, menyesuaikan keterampilan/yg dipraktekkan dengan kondisi yang dihadapinya, dan membangun keterampilan yang rekatif baru. Pandangan tiga aspek dalam belajar bahasa ini, yakni aspek kognitif, afektif, dan psikomotor) ini telah diterapkan cukup lama dalam praktek pembelajaran bahasa di sekolah-sekolah kita.
3. Pandangan kognitivistik lainnya menyatakan bahwa belajar bahasa harus memadukan apa yang dipelajarinya, yaitu pengetahuan yang mencakup pengetahuan yang bersifat faktual, konseptual, prosedural, dan pengetahuan yang telah dimilikinya (metakognitif) dengan kemampuan berpikirnya secara bertahap mulai dari kemampuan mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, menilai, dan membangun apa yang dipelajarinya ke dalam satu kesatuan atau ke dalam bentuk/struktur yang baru. Pandangan dua dimensi terhadap aspek kognitif ini dalam belajar bahasa dan mata pelajaran lainnya menjadi salah satu landasan yang digunakan dalam kurikulum 2013.

FILSAFAT PENDIDIKAN, ASPEK YURIDIS, SOSOK PESERTA DIDIK DAN KEBUTUHANNYA

1. Tujuan pendidikan nasional sebagaimana tertuang dalam UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas, Bab II tentang Dasar, Fungsi, dan Tujuan pendidikan Nasional, Pasal 3 menegaskan bahwa "Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
2. Pendidikan membentuk dan mengembangkan sosok peserta didik/manusia yang utuh (*fully functional person*) yang berpengetahuan, memiliki keterampilan, ber karakter, menyadari potensi dirinya, dan mengaktualisasikan potensinya bagi kemaslahatan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
3. Proses dan hasil pendidikan harus bermakna dan memberdayakan dirinya agar dapat berbuat bagi kemaslahatan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
4. Peserta didik dengan berbagai keunikannya memiliki potensi dan kebutuhannya yang bersifat fisik, psikologis, sosial, intelektual, dan kebutuhan untuk dapat berbuat bagi kemaslahatan dirinya dan orang lain.

Implikasi Landasan Pengembangan Kurikulum Bahasa Inggris terhadap pengembangan komponen kurikulumnya di antaranya adalah pentingnya perumusan tujuan umum yang dinyatakan dalam KI dan KD.

1. Rumusan tujuan umum pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar(KD) mengacu kepada tujuan pendidikan nasional yang meletakkan dimensi karakter pada urutan pertama (sikap dan perilaku), pengetahuan (apa yang dipelajari, pengetahuan bersifat faktual, konseptual, prosedural, dan pengetahuan siap (metakognitif), dan kemampuan/keterampilan berpikir peserta didik secara berjenjang (mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, menyintesa, menilai, dan menciptakan sesuatu/berpikir kreatif) yang dilandasi oleh nilai-nilai agama, keyakinan, dan kearifan local (nilai-nilai budaya setempat).
2. Tiga dimensi dalam tujuan ini dalam pengembangan kurikulum bahasa berdasarkan pendekatan sistematis sebagaimana tergambar di atas harus menjadi arah (pemandu) dalam memilih dan mengorganisasikan bahan ajar, memilih dan mengembangkan kegiatan pembelajaran dan memilih serta mengembangkan penilaian baik proses maupun hasil belajar.
3. Hubungan antara komponen kurikulum bahasa Inggris secara spesifik yang harus tergambar pada silabus berdasarkan landasan yang digunakan dalam pengembangan kurikulum dapat digambarkan sebagai berikut.



III. REKOMENDASI

KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR

1. Mekanisme finalisasi KI-KD serta bagaimana kaitannya dengan SK perlu diperjelas karena bagian yang langsung terkait dengan pelaksanaan Mata Pelajaran dalam Kurikulum 2013 di kelas belum diuji-publik. Sejauh ini yang diuji publik baru sebatas kebijakan makro yang disampaikan oleh Mendikbud dan Wamendikbud. Implementasi dan dampaknya di lapangan belum disimulasikan dan disosialisasikan secara rinci.
 - Untuk memperoleh hasil yang maksimal, KI-KD masih perlu (a) ditelaah pakar, (b) ditelaah guru, dan (c) diuji-publik/uji-coba.
2. Dalam Kurikulum 2013, KI nampak berbasis nilai dan sama untuk semua mata pelajaran. KI tersebut dijabarkan ke dalam KD setiap mata pelajaran. Para pengembang KD setiap mata pelajaran masih kesulitan menemukan formula pengembangan KI menjadi KD agar keduanya seiring sejalan. Misalnya, apakah guru di kelas akan mengajarkan nilai-nilai melalui substansi mata pelajaran ataukah mengajarkan substansi mata pelajaran yang baik secara langsung maupun tidak langsung akan mengembangkan nilai-nilai? Dalam kaitan ini, TEFLIN berpendapat bahwa:
 - Kompetensi dasar hendaknya didefinisikan sebagai kompetensi bahasa Inggris dengan nilai-nilai yang ada di dalam KI. Misalnya: kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris lisan maupun tulis dengan saling menunggu giliran bicara (menghargai orang lain). Atau kemampuan berkomunikasi lisan maupun tulis dalam bahasa Inggris dengan menggunakan fakta yang benar (kejujuran).
 - Pengembang silabus, pengembang bahan ajar, guru dan pengawas akan sangat terbantu bila KD dirinci dengan indikator pencapaian agar memberi arahan kepada pihak terkait dalam merancang, melaksanakan, dan menilai keberhasilan proses pembelajaran.
3. Pemerintah menyatakan bahwa Kurikulum 2013 berbasis kompetensi (Competency-Based), tetapi hirarki kompetensinya, terutama dalam KD, belum nampak jelas benar karena belum ada indikator. Belum nampak landasan berpikir bagaimana pemerolehan nilai-nilai digradasikan. Apakah untuk siswa SMP kelas VII nilai yang diajarkan hanya sebatas menghargai (perilaku jujur, sopan, dll.)? Apakah pada saat yang sama mereka tidak diajarkan untuk berperilaku jujur, santun, toleran, dan bertanggung jawab) sebab kata “menghargai” dan “berperilaku jujur” jelas berbeda? Lebih jauh lagi, apa dasar penetapan nilai-nilai yang dikembangkan di SMP itu menghargai, sementara di SMA mengembangkan perilaku santun, jujur, dan peduli? Apakah menghargai dilakukan terlebih dahulu di SMP baru mengembangkannya ketika di SMA? Dengan kata lain, terlalu mengada-ada kalau perkembangan nilai-nilai dipisah-pisah dan digradasikan sebab perkembangan nilai beda dengan perkembangan kognitif. Pemerolehan nilai lebih cyclical sementara kognitif lebih linier. Dalam kaitan ini, TEFLIN berkeyakinan bahwa:
 - Gradasi kompetensi lebih tepat disusun berdasarkan hirarki kesulitan substansi mata pelajaran seperti yang selama ini dilakukan. Adapun aspek nilai secara melekat mengikuti setiap kompetensi yang diajarkan. Pengembangan nilai tidak perlu digradasikan secara linier, melainkan dapat berulang, beririsan, dan saling menguatkan.

- Jalan keluar lain yang mungkin dilakukan adalah (KI) yang bersifat sama untuk semua mata pelajaran ditarik ke tataran yang lebih tinggi, yaitu Standar Kompetensi Lulusan (SKL), sedangkan posisi KI diisi dengan kompetensi inti yang terkait dengan substansi mata pelajaran. Sebagai ilustrasi, KI mata pelajaran bahasa Inggris berisi kompetensi berbahasa Inggris yang mencakup keterampilan "listening, reading, speaking, dan writing". Selanjutnya Kompetensi Dasar menjabarkan KI secara lebih rinci dan konkret yang mengandung rumusan nilai-nilai karakter sebagaimana yang telah dirumuskan oleh tim perumus TEFLIN. Setiap KD dielaborasi ke dalam sejumlah indikator yang lebih operasional. Dengan demikian, secara substantif ada 3 layers kompetensi: KI, KD, dan Indikator. Sementara kompetensi "karakter" diangkat ke tingkat SKL.
4. Kurikulum 2013 laksana gula-gula yang ditawarkan pada anak oleh orang tua. Rasanya manis dan membuat anak senang tetapi sebenarnya berbahaya karena merusak gigi anak. Kurikulum 2013 yang mengurangi beban guru karena tidak lagi harus menyusun silabus dan menyiapkan bahan ajar juga membuat guru tepuk tangan senang. Padahal cepat atau lambat berkurangnya beban itu akan mengikis kreativitas dan kompetensi guru dalam menganalisis kompetensi yang akan dicapai, materi yang dibutuhkan, kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan serta penilaiannya yang cocok. Guru yang tidak memiliki keterampilan tersebut akan menjadi tidak berdaya ketika dihadapkan pada pengambilan keputusan di tengah ketidakpastian di kelas. Di sisi lain, Kurikulum 2013 merupakan sebuah ironi di tengah trend pendidikan dunia yang makin menuntut pemberdayaan, ketidakbergantungan pada metodologi (post method era) dan desentralisasi karena menempatkan guru hanya sebagai aktor pelaksana apa yang disuapkan pemerintah pusat. Dengan kata lain, silabus dan buku babon yang disiapkan pemerintah pusat mengancam teacher empowerment. Dalam kaitan ini, TEFLIN berkeyakinan bahwa:
- Guru-guru yang kreatif dan cerdas sebaiknya diberi ruang yang seluas-luasnya melalui berbagai media untuk mengembangkan silabus, bahan ajar, dan RPP. Sekolah yang tetap ingin menerapkan pengembangan kurikulum berbasis sekolah atau sering disebut KTSP juga harus diberi kesempatan dan didorong tidak hanya dari sisi peraturan dan kelembagaan, tetapi juga pembiayaannya.
 - Sentralisasi silabus dan bahan ajar yang dibuat di Jakarta dapat menyebabkan potensi lokal tidak terwadahi. Anak bangsa dari kawasan timur Indonesia, akan tercerabut dari akar budaya lokalnya karena dicekoki informasi seputar Jakarta atau kota-kota besar lainnya. Pada akhirnya, kondisi itu dapat mengancam keragaman dan kohesivitas bangsa secara keseluruhan.
5. Pernyataan KI dan KD dalam dokumen yang beredar masih sulit dipahami selain karena kalimatnya panjang-panjang juga karena istilah yang digunakan banyak yang multi-tafsir dan abstrak. Sebagai contoh kasus, beberapa anggota TEFLIN peserta FGD yang sebagian besar merupakan doktor dan profesor, mengalami kesulitan dalam memahami KI dan KD. Padahal KI dan KD akan menjadi pedoman bagi guru dalam menyusun RPP, melaksanakan dan menilai hasil pembelajaran. Dalam menyusun kompetensi, misalnya, kata-kata operasional lazim digunakan. Namun dalam dokumen yang ada, baik untuk SMP/MTs maupun SMA/MI, sebagian besar kata kerja yang tak dapat diukur seperti "memahami" dan "menghargai" masih digunakan. Dalam kaitan ini, TEFLIN merekomendasikan kepada pemerintah untuk:

- Memberi penjelasan yang jelas dan rinci mengenai KI dan KD, baik dari sisi peristilahan, struktur kalimat, prinsip pengembangan, filosofi dan pendekatan yang digunakan sehingga dokumen KI dan KD menjadi jelas dengan sendirinya (self-explanatory).
- Walaupun tujuannya untuk memperjelas pernyataan KD, penghilangan atau penerjemahan istilah teknis linguistik secara membabi buta seperti recount (yang diterjemahkan menjadi “teks yang menceritakan pengalaman yang telah lalu untuk membuat senang atau bangga”) cenderung menyebabkan KD menjadi kompleks dan sulit dipahami.

6. Pengelompokan teks:

Jika teori bahasa yang dipakai dalam kurikulum 2013 itu linguistik sistemik fungsional, dalam teori linguistik ini semua bahasa dan dengan demikian semua teks, merepresentasikan 3 metafungsi bahasa secara simultan, yakni *ideational metafunction*, yang terdiri dari *experiential*, yakni bahasa untuk merepresentasikan pengalaman dan logika, *interpersonal metafunction* yang menunjukkan bahwa bahasa itu dipakai untuk memelihara hubungan dan untuk bertukar informasi atau barang, dan *textual metafunction* yakni bahasa dipakai untuk menciptakan teks yang *coherent* dan *cohesive*, untuk menghubungkan teks yang satu dengan yang lain atau *move* yang satu dalam sebuah teks dengan *move* yang lain atau kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Semua ini beroperasi secara simultan.

Dengan demikian, semua teks pasti fungsional karena kalau tidak fungsional, berarti tidak merepresentasikan ketiga metafungsi itu dengan baik. Kalau *conjunction* saja salah, misalnya, yang merupakan bagian dari fungsi logika dari bahasa, teks tidak akan bisa dimengerti dan dengan demikian, tidak bisa dikatakan teks. Demikian pula dari segi *interpersonal metafunction* bahasa, pengelompokan teks transaksional dan interpersonal tampaknya kurang tepat karena semua teks itu dibuat untuk memelihara hubungan dengan orang lain dan agar sesuatu dapat diselesaikan. Kita tidak pernah menghasilkan struktur bahasa sebagai akhir dari struktur itu sendiri. Kita melakukannya karena ia menghubungkan kita dengan orang lain, dan karena ia membuat sesuatu terselesaikan.

Menurut SFL, semua teks itu merepresentasikan semua fungsi bahasa secara simultan. Oleh karenanya, pengelompokan teks menjadi teks fungsional, transaksional itu kurang tepat. Semua teks menurut SFL fungsional karena ia merepresentasikan bagaimana bahasa digunakan untuk mencapai tujuan yang berbeda dalam konteks sosial yang berbeda. Dalam *network system* yang dikembangkan para pendukung pendekatan berbasis genre, tidak ada pengelompokan teks seperti itu. Para pendukung genre-based umumnya mengelompokkan teks menjadi dua kelompok besar, yakni *factual* dan *stories*, setelah itu dibagi-bagi lagi menjadi beberapa macam.

Dengan pengelompokan teks menjadi interpersonal, transaksional dan fungsional itu ada kekhawatiran bahwa kalau teks itu fungsional, berarti tidak transaksional atau sebaliknya. Padahal semua teks itu fungsional dan transaksional secara bersamaan. Dalam kaitan ini TEFLIN merekomendasikan agar:

- Teks dikelompokkan menjadi teks faktual dan *imaginative* atau *stories* secara garis besarnya, setelah itu teks faktual apa saja, teks stories apa saja. Misalnya, texts that engage and entertain – stories, texts that inform: Recount, procedures, reports, explanation, dan texts that persuade: exposition, response.

- Setiap teks digambarkan dengan urutannya, mulai dari yang kurang menantang, sampai ke yang lebih menantang. Selain itu, topiknya dapat dibagi menjadi tiga kategori: *Community access* (misalnya, anak akan bisa belajar tentang pengumuman yang ditemukan di stasiun, atau di tempat2-tempat umum lain), *education* (hal-hal berkenaan dengan kehidupan sekolah), dan *employment* (berkaitan dengan pekerjaan). Topiknya juga sama diurut lagi, dari yang sederhana sampai yang lebih kompleks.

FOKUS KURIKULUM BAHASA INGGRIS 2013

7. Fokus keterampilan berbahasa Inggris dalam Kurikulum 2013 sebaiknya jelas dan proporsional. Berdasarkan pengalaman para guru di sekolah, apabila semua keterampilan (listening, speaking, reading, writing) diberi penekanan yang sama dengan jumlah jam pelajaran terbatas, pencapaian tujuannya akan menjadi berat dan kurang rasional baik bagi para guru maupun siswa. Dalam kaitan ini, TEFLIN merekomendasikan bahwa:
 - Sebaiknya pada setiap satuan pendidikan diberi fokus keterampilan yang berbeda dan berjenjang sehingga hasil dan pencapaian belajar siswa bisa lebih terukur. Fokus pada keterampilan berbicara sederhana pada tingkat SLTP dan pada keterampilan membaca pada tingkat SMA/MI bisa saja dilakukan.

KEDUDUKAN BAHASA INGGRIS DI SD

8. Pemerintah perlu memperjelas status pengajaran Bahasa Inggris di SD, apakah (a) sebaiknya tetap statusnya sebagai muatan lokal, dan/atau (b) berstatus sebagai kegiatan ekstra-kurikuler seperti yang selama ini disampaikan oleh pimpinan Kemendiknas dalam forum-forum. TEFLIN merekomendasikan agar:
 - Sebaiknya dibuka 3 alternatif status bahasa Inggris di Sekolah Dasar, yaitu: (a) dijadikan muatan lokal untuk sekolah yang memiliki sumber daya manusia dan kapasitas yang memadai, (b) sebagai ekstra-kurikuler untuk sekolah yang sumber daya manusia dan kapasitasnya terbatas, atau (c) tidak boleh diajarkan di SD yang tidak memiliki SDM dan kapasitas sama sekali.
 - Pilihan paling aman dari ketiga pilihan di atas adalah tetap memberlakukan bahasa Inggris di SD sebagai muatan lokal sehingga guru-guru bahasa Inggris di SD yang telah tersertifikasi tidak kehilangan pekerjaan dan minat masyarakat yang tinggi akan bahasa Inggris dapat terakomodasi.

STATUS BUKU “BABON”

9. Pemerintah perlu memberi penjelasan mengenai status “Buku Babon”, apakah (a) sebagai pilihan bagi guru/sekolah yang tidak dapat mengembangkan bahan pembelajaran sendiri, atau (b) sebagai satu-satunya buku yang harus digunakan (sebagai buku paket nasional) sehingga tidak boleh ada buku lain yang digunakan oleh guru, atau (c) sebagai buku utama yang dapat dilengkapi dengan buku/bahan pembelajaran lainnya jika dianggap perlu oleh guru/sekolah. Dalam kaitan ini, TEFLIN berpendapat bahwa:
- Sebaiknya guru/sekolah masih boleh menggunakan buku lain sebagai suplemen atau pengayaan terhadap buku paket nasional.
 - Buku babon/paket nasional harus dikembangkan melalui proses uji-publik, uji-coba, telaah pakar, dan telaah guru.
 - Buku babon/paket nasional harus dikembangkan berdasarkan KI dan KD. Bila KI dan KD belum ditetapkan, buku yang disusun dikhawatirkan menyimpang dari SK dan KD dan dapat menyebabkan ketidaktercapaian kompetensi yang ditetapkan, selain juga merupakan pemborosan anggaran.
 - Pendistribusian buku paket harus diperbaiki manajemennya sehingga buku sampai pada sekolah yang membutuhkan. Pengalaman distribusi buku paket tahun 2013 menunjukkan bahwa data dan pencatatan yang tidak akurat menyebabkan adanya satu sekolah yang dikirim buku paket beberapa kali sementara sekolah lainnya belum pernah dikirim sekalipun.
 - Penggunaan buku babon tanpa disertai upaya pemberdayaan guru dapat menyebabkan guru hanya menggunakan buku langsung dalam proses pembelajaran di kelas tanpa penyusunan RPP terlebih dahulu.

STATUS SILABUS

10. Pemerintah juga perlu memperjelas status “Silabus”, khususnya yang terkait dengan metode pembelajaran, apakah (a) sebagai silabus nasional yang menjadi acuan satu-satunya untuk digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran di kelas, atau (b) guru dapat menggunakan/mengembangkan metode pembelajaran yang dianggap paling sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa di masing-masing kelas/sekolah mereka, dan apakah (c) guru masih boleh/perlu mengembangkan RPP mereka sendiri agar lebih sesuai dengan kondisi yang mereka hadapi di kelas/sekolah mereka masing-masing. Dalam kaitan ini TEFLIN berkeyakinan bahwa:
- Kreativitas guru untuk menggunakan/mengembangkan metode mengajar yang paling sesuai dengan karakteristik peserta didik harus tetap dijamin sesuai dengan semangat gerakan “*Post Method*” dan pemberdayaan guru (*teacher empowerment*) untuk menjaga profesionalisme guru dalam mengajar di kelas.

POSISI UJIAN NASIONAL

11. Pemerintah juga perlu menetapkan posisi dan status Ujian Nasional, apakah (a) diubah fungsi sebagai pemetaan mutu pendidikan saja, tidak lagi digunakan sebagai faktor penentu kelulusan siswa agar penekanan pada proses dan produk (bukan hanya produk saja) dalam Kurikulum 2013 dapat dijamin dalam pelaksanaannya, (b) tetap sebagai salah satu faktor penentu kelulusan akan tetapi perlu ada jaminan bahwa ujian sekolah sebagai faktor penentu lainnya betul-betul dilaksanakan secara konsisten agar kompetensi yang terkait dengan *speaking* dan *writing* juga menjadi perhatian guru dalam proses pembelajaran di kelas. Dalam kaitannya dengan posisi UN, TEFLIN berkeyakinan bahwa:

- Jika UN tetap sebagai faktor penentu kelulusan seperti kecenderungan selama ini, ujian sekolah dalam mata pelajaran bahasa Inggris untuk *speaking* dan *writing* harus dilaksanakan dan digunakan sebagai faktor penentu lain bagi kelulusan siswa. Dengan kata lain, keempat keterampilan berbahasa harus dijadikan acuan bagi penentuan kelulusan siswa sebab UN saja belum cukup.

IMPLEMENTASI KURIKULUM

12. Dalam setiap perubahan kurikulum yang terjadi, pada tataran konsep dan kebijakan makro biasanya tidak ada masalah. Permasalahan justru muncul dalam implementasi dan supervisinya. Sosialisasi yang masih bersifat umum dan cenderung formalitas serta jumlah jam pelatihan yang terbatas dapat menyebabkan pihak yang berkepentingan di lapangan seperti guru dan kepala sekolah mengalami kesulitan terutama mengenai wujud nyata perubahan kurikulum dalam pengelolaan sekolah dan praktik guru mengajar di kelas. Dalam kaitan ini, TEFLIN berkeyakinan bahwa:

- Sosialisasi kurikulum akan efektif apabila ditindaklanjuti dengan supervisi lapangan oleh pihak yang memahami benar Kurikulum 2013. Supervisi harus dilakukan baik saat guru mengikuti sosialisasi dan pelatihan tetapi juga setelah mereka kembali ke kelas. Supervisi harus diarahkan pada pengawasan bagaimana guru memahami KI, KD dan Silabus, bagaimana pengembangan RPP-nya, bagaimana implementasinya di kelas serta bagaimana penilaiannya dilakukan.
- Penghilangan pengawas mapel dapat menyebabkan supervisi dilakukan oleh pengawas yang bukan bidang mata pelajarannya. Bila ini terjadi, pengawasan tidak akan menyentuh hal mendasar yang berkaitan langsung dengan substansi mata pelajaran dan kinerja guru di kelas. Tidak akan ada masukan fundamental bila ada kesalahan konsep yang dilakukan guru karena pengawas bukan berasal dari mata pelajaran itu.
- Sosialisasi, implementasi, dan supervisi akan efektif apabila ditindaklanjuti oleh pengembangan staf berkelanjutan (*continuous professional development*) sebab sehebat apa pun kurikulum, silabus, dan buku ajar, bila profesionalisme gurunya tidak terus menerus dikembangkan, perubahan tidak akan terjadi secara signifikan. Untuk itu, pelibatan MGMP dalam pengembangan staf, pelibatan pihak terkait seperti LPTK melalui berbagai skema seperti dalam *Lesson Study* dan *In*

House Training, pelibatan LSM dan juga lembaga donor seperti USAID, AUSAID dan JICA perlu terus menerus dilakukan.

- Jumlah jam pelajaran di SMA yang hanya 2 jam pelajaran (90 menit) dalam satu minggu bertolak belakang dengan tantangan issue globalisasi yang menjadi landasan utama perubahan kurikulum. Dengan jumlah jam terbatas ditambah status bahasa Inggris di Indonesia yang masih merupakan bahasa asing, pajanan yang akan diperoleh siswa akan sangat terbatas. Padahal pajanan merupakan kunci utama keberhasilan pemerolehan bahasa. Dengan penguasaan bahasa yang amat terbatas akan sangat tidak mungkin para siswa dapat memahami pikiran orang lain dan mengungkapkan pikiran dan gagasannya sendiri kepada dunia. Dalam konteks ini TEFLIN merekomendasikan agar jumlah jam pelajaran bahasa Inggris di SMA dipertahankan minimal 4 jam pelajaran per minggu.

PERHATIAN TERHADAP KURIKULUM SMK

13. Selama ini ketika perubahan kurikulum dilakukan, perhatian lebih banyak diarahkan kepada SMP/MTs dan SMA/MI, sementara SMK terabaikan. Contohnya, dalam KTSP 2004, SMP/MTs dan SMA/MI menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis *genre*, sementara SMK masih berupa bahasa Inggris umum yang isinya sama untuk semua jurusan di SMK. Dalam kaitan ini TEFLIN berkeyakinan bahwa:

- Mata pelajaran Bahasa Inggris di sekolah kejuruan perlu mendapat perhatian yang cukup dalam Kurikulum 2013 baik dalam hal jumlah jam pelajaran, fokus keterampilan berbahasa, maupun aspek kebahasaan lainnya. Karena sifatnya yang khas, pendekatan pembelajaran di SMK harus lebih di arahkan pada bahasa Inggris untuk tujuan khusus (*English for Specific Purposes*).

KETERLIBATAN LPTK

14. Keterlibatan LPTK dalam penyusunan, sosialisasi dan rencana implementasi Kurikulum 2013 terasa sangat terbatas dan masih bersifat individual. Sosialisasi dan uji publik belum menyentuh LPTK. Padahal sebagai lembaga yang memproduksi guru, secara langsung maupun tidak langsung, LPTK juga akan terkena dampak yang cukup besar dan mendasar baik atas kurikulum maupun proses belajar mengajar di LPTK. TEFLIN merekomendasikan bahwa:

- Peran LPTK sebaiknya dioptimalkan dalam penyusunan kurikulum. Diantaranya, LPTK dapat dijadikan sebagai lembaga yang memonitor implementasi Kurikulum 2013. Hal ini penting mengingat LPTK memiliki akses dan kerja sama langsung dengan sekolah di mana Kurikulum tersebut diimplementasikan.
- Kurikulum 2013 ini perlu memuat KI dan KD yang lebih jelas dan tepat sehingga dapat menjadi acuan para dosen dan mahasiswa, termasuk ketika para mahasiswa menjadi guru praktikan dalam program PPL di sekolah-sekolah.
- Karena KI-KD belum diuji-publik, LPTK, khususnya yang terkait langsung dengan pendidikan Bahasa Inggris yang menghasilkan guru Bahasa Inggris, perlu dilibatkan

dalam uji-publik terhadap KI-KD sebelum dinyatakan final untuk diimplementasikan.

ASPEK YURIDIS

15. Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas menyebutkan bahwa, “Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan Propinsi untuk pendidikan menengah”. Bila dalam Kurikulum 2013 Pemerintah mengambil alih tugas dan tanggung jawab sekolah mengembangkan kurikulum dengan membuat di antaranya KI, KD, Indikator, dan Silabus, berarti Pemerintah melanggar undang-undang. Dalam kaitan ini, TEFLIN merekomendasikan agar pemerintah:

Mengkaji secara komprehensif implementasi Kurikulum 2013 dari berbagai aspek, baik aspek akademis, sosiologis, maupun yuridis, sehingga kita semua tidak menghabiskan energi untuk hal yang tidak perlu sebab bisa saja suatu saat Kurikulum 2013 digugat di pengadilan dan pemerintah kalah sehingga Kurikulum 2013 dibatalkan seperti halnya RSBI.

IV. PENUTUP

Sebagai penutup, TEFLIN memaklumi keputusan pemerintah untuk menerapkan Kurikulum 2013 pada bulan Juli 2013 ini. Walaupun demikian, TEFLIN merasa rencana pemerintah tersebut tergesa-gesa karena masih banyak kelemahan di sana-sini baik dari sisi dokumen, prosedur pengembangan kurikulum dari segi legal maupun substansial, sosialisasi, maupun kemungkinan implementasinya di lapangan. TEFLIN merekomendasikan kepada pemerintah untuk segera melakukan perbaikan dalam redaksi, gradasi, dan koherensi Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar pelajaran Bahasa Inggris melalui uji-publik/telaah pakar dan praktisi sehingga keterbacaannya meningkat. Pemerintah juga harus menempatkan posisinya yang jelas mengenai status buku babon, silabus, fokus keterampilan berbahasa yang dikembangkan, ujian nasional, kurikulum SMK, serta status bahasa Inggris di SD. Pemerintah juga disarankan untuk melakukan proses sosialisasi yang lebih konseptual mengenai apa yang harus dilakukan oleh guru di lapangan dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk LPTK.

DAFTAR HADIR
TEFLIN FOCUS-GROUP DISCUSSION
BANDUNG, SABTU, 16-17 FEBRUARI 2013

NO.	NAMA	Asal Institusi
1	Drs. Setyadi Setyapranata, MPd.	Universitas Negeri Malang
2	Prof. A. Chaedar Alwasilah, PhD	Universitas Pendidikan Indonesia
3	Prof. Dr. Wuri Andhayani Soedjatmiko	Universitas Widya Mandala, Surabaya
4	Prof. Fuad Abdul Hamied, PhD	Universitas Pendidikan Indonesia
5	Prof. Ali Saukah, PhD	Universitas Negeri Malang
6	Sisilia S. Halimi, PhD	Universitas Indonesia
7	Prof. Dr. Nenden Sri L., MPd.	Universitas Pendidikan Indonesia
8	Prof. Dr. Joko Nurkamto, MPd.	Universitas Sebelas Maret
9	Dr. Suharmanto Ruslan, MPd.	Universitas Negeri Malang
10	Prof. Utami Widiati, PhD	Universitas Negeri Malang
11	Prof. Dr. Chuzaimah D. Diem, MLS, Ed.D	Universitas Sriwijaya
12	Dra. Yusufardiah, MPd.	Universitas Tanjungpura, Pontianak
13	Surya Sili, PhD.	Universitas Mulawarman, Samarinda
14	Dr. Regina Petronella	SMP Negeri 33 Palembang
15	Siti Wachidah, PhD	Universitas Negeri Jakarta
16	Mutiara O. Panjaitan, MPd.	Puskurbuk, Jakarta
17	Dr. Teriska Rahardjo	P4TK Bahasa Jakarta
18	Dr. Wachyu Sundayana, MA	Universitas Pendidikan Indonesia
19	Dr. Suwandi, MPd.	IKIP PGRI Semarang
20	Dr. Dwi Anggani Linggar Bharati. , MPd.	Universitas Negeri Semarang
21	Dr. Agustine Hartati, MPd.	SMA Negeri 8 Bandung
22	Heli Setiawati, SPd.	SMP Negeri 13 Bandung
23	Pupung Purnawarman, PhD	Universitas Pendidikan Indonesia
24	Itje Chodujah, MA	British Council Jakarta
25	Dr. Ni Luh Nyoman Seri Malini, MHum.	Universitas Udayana, Bali
26	Dr. Didi Sukyadi	Universitas Pendidikan Indonesia
27.	Dr. Luciana, MEd.	Unika Atma Jaya, Jakarta
28.	Emi Emilia, PhD	Universitas Pendidikan Indonesia
29.	Dr. R. Safrina, MA	Universitas Pendidikan Indonesia
30.	Lulu Laela Amalia, MPd.	Universitas Pendidikan Indonesia
31.	Ika Lestari Damayanti, MA	Universitas Pendidikan Indonesia
32.	Oceng, SPd.	SMA Negeri 1 Lembang, Bandung
33.	Ari Arifin, MA	Balai Bahasa Universitas Pendidikan Indonesia